

ABSTRAK

Nama : Daliati

NIM : 14.16.15.0011

Judul : Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo

Kata Kunci : Perbankan syariah dan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersifat mandiri. Hal ini dapat dilihat pasca krisis 1997 di Indonesia UMKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian. Salah satu lembaga keuangan yang dapat mendukung perkembangan UMKM yaitu perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbankan syariah dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses usaha terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu aksidental sampling. Data diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda serta menggunakan *SPSS for windows*.

Hasil penelitian ini didapatkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.305 atau sama dengan 30.5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang diberikan perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo sebesar 30.5% dengan 69.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji simultan memperlihatkan bahwa nilai F_{Hitung} sebesar 3.809 dan F_{Tabel} 2.98 atau $3.809 > 2.98$ dengan nilai probabilitas signifikannya sebesar 0.022 atau $0.022 < 0.05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Maka variabel perbankan syariah dari aspek kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel UMKM.

**PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
(SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

DALIATI
NIM 14.16.15.0011

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO**

2018

**PENGARUH PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
DI KOTA PALOPO**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Oleh

DALIATI

NIM 14.16.15.0011

Dibimbing Oleh:

Zainuddin S, SE., M.Ak. (Pembimbing I)

Dr. Fasiha, M.EI (Pembimbing II)

Diuji Oleh:

Ilham, S.Ag., M.A. (Penguji I)

Dr. Adzan Noor, SE.Sy., M.A., Ek (Penguji II)

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo**” yang ditulis oleh **Daliati**, dengan **NIM 14.16.15.0011** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Sabtu **24 Maret 2018 M** bertepatan dengan **06 Rajab 1439 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 24 Maret 2018

M

06 Rajab 1439 H

TIM PENGUJI

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang (.....) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A. | Penguji I (.....) |
| 4. Dr. Adzan Noor, SE.Sy., M.A., Ek | Penguji II (.....) |
| 5. Zainuddin. S, S.E., M.Ak. | Pembimbing I (.....) |
| 6. Dr. Fasiha, M.EI | Pembimbing II (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program

Studi Perbankan Syariah

Dr.Hj. RamlahM, M.M.

Zainuddin S, S.E.,

M.Ak.

NIP 196102081994032001 NIP 197710182006041001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
PERSETUJUAN PENGUJI.....	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL	xvi
ABSTRAK	xvii
PRAKATA	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional Variabel.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 8

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Kajian Pustaka.....	10
1. Perbankan syariah	10
a. Kelompok Bank Syariah	14
b. Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah	16
c. Fungsi Bank Syariah	19
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	33
a. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	35
b. Kontribusi UMKM terhadap PDB	37
c. Tantangan dan Kendala Pengembangan UMKM	37
3. Kerangka Pikir.....	40

BAB III METODE PENELITIAN 41

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	41
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	43
1. Uji Instrumen	44
2. Uji Asumsi Klasik	47
3. Analisis Regresi Linear Berganda	48

4. Uji Hipotesis	49
------------------------	----

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 52

A. Hasil Penelitian	52
1. Deskriptif Variabel	52
a. Variabel Perbankan Syariah Aspek Kelembagaan	52
b. Variabel Perbankan Syariah Aspek Kegiatan Usaha	54
c. Variabel Perbankan Syariah Aspek Proses Usaha	55
d. Variabel UMKM	57
2. Uji Asumsi Klasik	58
a. Uji Autokorelasi	58
b. Uji Multikolonieritas	59
c. Uji Heterokedastisitas	60
3. Uji Hipotesis	61
a. Uji Koefesien Determinasi	61
b. Uji Parsial (t)	61
c. Uji Simultan (f)	62
B. Pembahasan	63

BAB V PENUTUP 67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan UMKM Aktif Kota Palopo 2011-2016	3
Tabel 2.1 Kriteria UMKM	35
Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas.....	45
Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas	46
Tabel 4.1 Deskriptif Variabel Perbankan syariah Aspek Kelembagaan	52
Tabel 4.2 Deskriptif Variabel Perbankan syariah Aspek Kegiatan Usaha ...	54
Tabel 4.3 Deskriptif Variabel Perbankan syariah Aspek Proses Usaha	55
Tabel 4.4 Deskriptif Variabel UMKM	57
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolonieritas	59
Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas	60
Tabael 4.8 Hasil Uji Koefesien Determinasi R^2	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Parsial (uji-t)	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji-f)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	40
---------------------------------	----

ABSTRAK

Nama : Daliati

NIM : 14.16.15.0011

Judul : Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palopo

Kata Kunci : Perbankan syariah dan UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersifat mandiri. Hal ini dapat dilihat pasca krisis 1997 di Indonesia UMKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian. Salah satu lembaga keuangan yang dapat mendukung perkembangan UMKM yaitu perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbankan syariah dari segi kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses usaha terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu aksidental sampling. Data diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda serta menggunakan *SPSS for windows*.

Hasil penelitian ini didapatkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.305 atau sama dengan 30.5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang diberikan perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo sebesar 30.5% dengan 69.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji simultan memperlihatkan bahwa nilai F_{Hitung} sebesar 3.809 dan F_{Tabel} 2.98 atau $3.809 > 2.98$ dengan nilai probabilitas signifikannya sebesar 0.022 atau $0.022 < 0.05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Maka variabel perbankan syariah dari aspek kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dari data laporan tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2016 diperoleh data bahwa jumlah UMKM tahun 2015 sebesar 59.262.772 UMKM yang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan pangsa pasar sebesar 99.99%.¹. Peningkatan jumlah UMKM tentu akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kredit yang dikururkan oleh lembaga keuangan, baik lembaga bank maupun non bank.²

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bersifat mandiri. Hal ini dapat dilihat Pasca krisis 1997 di Indonesia UMKM dapat membuktikan bahwa sektor ini dapat menjadi tumpuan bagi perekonomian. Hal ini dikarenakan UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang cenderung mengalami keterpurukan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah UMKM setiap tahunnya. UMKM di negara berkembang hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam jumlah dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja. Begitu pula kondisi yang ada di Indonesia.

¹Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016. h. 12

²Eko Kurniasih Pratiwi, Nasitotul Jannah. *Peran Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Magelang*. 2015.h.2.

Namun, Indonesia terkadang masih memandang sebelah mata keberadaan UMKM. Padahal keberadaan UMKM dirasa sangat penting dalam membangkitkan kembali ekonomi nasional yang terpuruk akibat krisis. UMKM telah menunjukkan memiliki fondasi yang kuat sehingga mampu mandiri, tetapi dalam kenyataannya, hingga kini UMKM tetap seperti dianaktirikan. Pemerintah belum bisa memberikan solusi yang tuntas bagi pengembangannya, terutama dalam meningkatkan kualitas produknya maupun dalam mengatasi kesulitan permodalan.³ Adapun permasalahan yang sedang dihadapi UMKM yaitu rendahnya profesionalisme sumber daya manusia dalam mengelolah, keterbatasan permodalan dan akses ke lembaga keuangan dan rendahnya penguasaan teknologi.

Perkembangan UMKM di Indonesia memiliki hambatan yang ditinjau dari dua faktor. Pertama, faktor internal yaitu lemah pada segi permodalan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kedua, faktor eksternal yaitu muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM itu sendiri.⁴ Iklim yang kurang mendukung, kebijakan pemerintah yang tidak mendukung serta kurangnya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.⁵

UMKM memiliki peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. UMKM menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat Kota Palopo. Perkembangan UMKM di Kota Palopo berperan dalam penyerapan tenaga kerja

³Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 79

⁴Setyani Irmawati dkk. "Model Inklusif Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan", *Journal of Economic and Policy*, (Semarang September 2013), h.153

⁵Mohamad Nur Singgih. "Strategi Penguatan UMKM Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia ", *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol 3, No. 3 (Malang Oktober 2007) h. 223

dan sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat Kota Palopo. Berikut ini tabel perkembangan UMKM di Kota Palopo.

Tabel 1.1
Perkembangan Usaha Kecil Menengah Aktif
Kota Palopo dari Tahun 2011-2016

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah Unit Usaha (UMKM)
2011	2.520	1.337	64	3.921
2012	2.526	1.337	64	3.927
2013	3.044	1.331	40	4.415
2014	3.248	1.318	57	4.623
2015	3.537	1.341	57	4.935
2016	4.450	1.862	59	6.371

(Sumber : Dinas Koperindag Kota Palopo)

Dari data diatas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah UMKM Kota Palopo setiap tahunnya. Untuk Usaha Mikro setiap tahunnya mengalami peningkatan dan tentunya seiring dengan peningkatan ini tidak menutup kemungkinan ada jenis usaha yang sejenis, hal ini tentunya akan menimbulkan persaingan kompetitif diantara pengusaha itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Hasyr [59] sebagai berikut:

لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS al-Hasyr [59] 7).

Pada ayat ini menerangkan bahwa harta itu jangan hanya berputar pada lingkungan tertentu saja dari orang – orang kaya, tetapi tersebar pada berbagai pihak sehingga manfaatnya juga dirasakan oleh banyak pihak⁶ dengan perkembangan UMKM diharapkan dapat mengurangi jumlah tingkat kemiskinan yang tengah dihadapi saat ini.

Salah satu lembaga keuangan yang dapat mendukung perkembangan UMKM yaitu perbankan syariah. Peranan perbankan syariah dalam pengembangan UMKM yaitu mengatasi masalah keterbatasan modal. Dalam hal ini perbankan syariah memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Pemberian fasilitas pembiayaan atau permodalan modal kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Sebagai aktivitas utama lembaga keuangan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun, perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku

⁶Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta :Lentera Abadi,2010),h. 54

ekonomi yang strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total jumlah usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian “ **Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perkembangan UMKM di Kota Palopo.**”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo?

C. Hipotesis

H₀: Perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap perkembangan UMKM

H₁: Perbankan syariah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo

⁷Muslimin Kara. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum. Vol.47, No. 1, Juni 2013. h. 271-273.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktisi

Sebagai referensi dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang akan mengaplikasikan dalam kehidupan.

F. Definisi Operasional

Perbankan Syariah diukur dari 3 aspek yaitu kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha.

1. Aspek Kelembagaan

Kelembagaan adalah sistem dalam suatu organisasi untuk melakukan usaha demi mencapai suatu tujuan tertentu.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aturan, mekanisme penegakan dan organisasi.⁸

2. Aspek Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha adalah aktivitas yang dilakukan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan dalam bidang ekonomi.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penyaluran.⁹

⁸Azansyah, “Peran Kelembagaan dalam Perekonomian, kondisi Pembangunan Kelembagaan Di Indonesia, dan Membangun Lembaga Yang Efektif”, jurnal : “Ekonomi dan Bisnis Islam”, Vol. VII, No.2, (2013).

⁹Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2.

3. Aspek Proses Usaha

Proses usaha adalah rangkaian tindakan atau kejadian selama suatu usaha berlangsung yang dapat berubah.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akses, kualitas usaha dan penggunaan.¹⁰

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)(Y)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Adapun indikator UMKM yaitu tenaga kerja, pendapatan, jumlah aset dan Lokasi.¹¹

¹⁰Departemen Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia Tahun 2014, h. 14

¹¹Mukti Fajar. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 136

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang dimaksud adalah untuk mendapatkan tentang posisi penelitian ini dengan kaitannya dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini ditempuh guna menghindari kesamaan objek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada.

1. Yunita Muryasari (2017) dalam skripsi yang berjudul “Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah bagi UMKM dapat dikatakan efektif karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.¹² Persamaan penelitian Yunita Muryasari dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan perbedaannya yaitu Yunita Muryasari menggunakan data sekunder sedangkan penelitian ini menggunakan data primer .
2. Singgih Muheramtohad (2017) dalam skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian pembiayaan kepada UMKM lebih efektif, karena dialokasikan benar-benar kepada kebutuhan

¹² Yunita Muryasari. “*Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia*”. Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), h. xvi

usaha kecil secara langsung. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa landasan filosofi negara ini adalah Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menempati urutan keempat negara dengan ketimpangan terbesar di seluruh dunia, setelah Rusia, India dan Thailand. Dengan pemberian pembiayaan kepada UMKM, maka diharapkan ketimpangan ini dapat diperkecil, sesuai dengan cita-cita para *founding fathers* negara ini.¹³ Persamaan penelitian Singgih dengan penelitian ini yaitu keduanya meneliti tentang peran lembaga keuangan syariah terhadap UMKM,, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian singgih menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.

3. Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Jannah (2014) dalam skripsi yang berjudul “Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Kota Magelang” hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua perbankan syariah berperan dalam mengembangkan UMKM di Kota Magelang. Persamaan penelitian Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Jannah dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang perkembangan UMKM. Perbedaannya yaitu Penelitian ini akan mengambil sampel UMKM kota Palopo. Diharapkan melalui penelitian ini akan banyak hal yang dapat

¹³ Singgih Muheramtohad. *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Muqtasid, 2017. h. 112

membantu para Pengusaha terutama UMKM untuk meningkatkan kualitas produk sehingga produk tersebut memiliki daya saing di pasar.¹⁴

4. Hana Zunia Rini (2017) dalam skripsi yang berjudul “Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perbankan syariah terhadap eksistensi UMKM batik laweyan masih sangat minim, dan sosialisasi produk dari pihak bank syariahnya pun masih rendah, sehingga pelaku UMKM batik laweyan tidak tertarik untuk melakukan pinjaman atau pembiayaan di bank syariah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, antara lain bank syariah dianggap rumit dalam prosedur, istilah produk yang masih asing, rasa tidak pasti dan takut untuk melakukan pembiayaan di bank syariah.¹⁵ Persamaan penelitian Hana Zunia Rini dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kontribusi perbankan terhadap UMKM, sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian. Hana Zunia Rini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.

B. *Kajian Pustaka*

1. Perbankan Syariah

Pengertian perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

¹⁴Eko Kurniasih Pratiwi, Nasitotul Jannah, *Peran Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Magelang*. 2015. h.17.

¹⁵Hana Zunia Rini *Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan*. Journal of Multidisciplinary Studies. Vol 1, No.1, Januari-Juni 2017. h 67.

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁷

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

¹⁶Soyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syairah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h 2

¹⁷Soyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syairah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h 4

Pengertian syariah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 13 yaitu prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

Ketentuan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 angka 12 yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah, yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi, menjelaskan

“Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk”.

Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Ahlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-

nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.

Dari ketentuan tersebut harus disikapi bahwa dalam menjalankan bank syariah tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia, yang merupakan hubungan horisontal tetapi juga harus disikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia kepada Allah Swt. yang merupakan hubungan vertikal. Jika pelaksana bank syariah beranggapan bahwa hubungan vertikal merupakan urusan nanti setelah menghadap Yang Maha Kuasa, ini berarti sudah tidak ada kaitannya dengan muamalah lagi tetapi terkait dengan akidah, ahlak dan keimanan seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa "syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam". Ketentuan syariah didasarkan dari hukum Islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut "Fatwa Dewan Syariah Nasional". Fatwa inilah yang dipergunakan sebagai referensi atau rujukan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas syariah, termasuk bank syariah. Seperti diketahui bersama bahwa dalam hukum Islam banyak mazhab banyak sumbernya, sehingga mana yang dipergunakan itu telah dilakukan pembahasan yang sangat mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Sebagai pelaksana cukuplah mempergunakan rujukan fatwa tersebut tanpa terlibat terlalu jauh usul fikihnya.

Walaupun ketentuan syariah bersumber dari hukum Islam tidak berarti yang melaksanakan bank syariah termasuk nasabahnya beragama Islam. Banyak

bank syariah yang dikelola oleh dan memiliki nasabah non Islam menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Rasul pun juga pernah mencontoh melakukan transaksi jual beli gandum dengan seorang yahudi dan beliau menggadaikan baju besinya.¹⁸

A. Kelompok Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (1) Bank Umum Syariah, (2) Cabang Syariah Bank Konvensional/Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

a. Bank Umum Syariah

Dalam kelompok ini seluruh unit kerja bank yang bersangkutan dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat unit kerja yang paling bawah adalah menjalankan kegiatan usaha syariah sampai dengan tahun 2008 yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah adalah :

1. Bank Muamalat Indonesia (BMI).
2. Bank Syariah Mandiri (BSM), hasil konversi syariah Bank Susila Bhakti.
3. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), hasil konversi syariah Bank Tugu.
4. Bank Syariah BRI yang merupakan konversi dari Bank Jasa Artha dan gabungan Unit Usaha Syairah BRI.

¹⁸Soyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syairah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h 3-6

5. Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi dari Bank Perserikatan Indonesia, dan gabungan Unit Usaha Syariah Bukopin.

Dikategorikan Bank Umum Syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah kedudukan fungsi dan kegiatan usaha dari unit usaha syariah diatur tersendiri sebagaimana layaknya fungsi dan kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah, walaupun secara organisasi unit usaha syariah merupakan bagian dari bank umum yang menjalankan kegiatan usaha konvensional.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang untuk bank syariah, sehingga seluruh ketentuannya membahas tentang bank syariah. Berkaitan dengan kelompok bank syariah mempertegas pembentukan, kegiatan usaha yang diperkenankan dan yang dilarang oleh unit usaha syariah. Sedangkan bank perkreditan rakyat diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah). Dalam undang-undang tersebut tegas membedakan kelompok bank syariah sebagai (1) Bank Umum Syariah (2) Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara lengkap Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tercantum dalam lampiran tulisan ini.

¹⁹Soyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syairah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h. 9-10

B. Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah

Sebelum membahas lebih dalam tentang bidang kegiatan usaha perbankan syariah, sebagaimana telah dibahas di muka pembagian lembaga keuangan yang ada di Indonesia, dikelompokkan dalam yaitu :

a. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Yang dikelompokkan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu antara lain *Leasing*, *Factoring* (anjak piutang), *Consumer Financing*, asuransi, modal ventura, dana pensiun, pegadaian, perusahaan penjaminan. Lembaga ini dibawah pembinaan dan pengawasan dari Departemen Keuangan. Lembaga ini tidak diperkenankan untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat sehingga sumber dananya umumnya dari bank atau pemodal lainnya. Secara umum lembaga ini bergerak pada sektor riil.

b. Lembaga Keuangan Bank

Yang dikelompokkan lembaga ini adalah bank umum dan BPR. Lembaga ini dibawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Secara umum lembaga keuangan bank bergerak dalam bidang keuangan (sektor moneter). Sesuai ketentuan Bank Indonesia, bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha diluar dari *core businessnya* yaitu bidang keuangan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, perbankan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha diluar dari bisnis pokoknya yaitu bidang keuangan.

Sering timbul pertanyaan dimana kelompok bank syariah. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dibawah diberikan gambaran kegiatan usaha bank

syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan non bank lainnya, seperti misalnya perusahaan *leasing*, *multifinance*, pegadaian dan sebagainya.

1) *Leasing* – Ijarah

Bank Konvensional tidak pernah melakukan transaksi sewa, karena transaksi *leasing* merupakan kegiatan usaha perusahaan *leasing*. Seperti dijelaskan diatas bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha diluar bisnis pokoknya, yaitu bidang keuangan. Bank konvensional tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha penyewaan barang karena transaksi leasi perusahaan *leasing* menyediakan barang untuk dilakuan beli sewa. Bank syariah dapat menyewakan barang dengan mempergunakan akad Ijarah.

2) *Anjak Piutang* – *Hawalah* / Hiwalah

Hal ini tidak berbeda dengan *leasing* diatas. Bank konvensional tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi anjak piutang karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha perusahaan anjak piutang. Bank syariah diperkenankan untuk melakukan transaksi anjak piutang dengan akad *hawalah* atau hiwalah tujuan tolong menolong. Dalam perusahaan anjak piutang umum dilakukan dengan sistem diskonto. Sedangkan pada bank syariah sifatnya tolong menolong dan tidak diperkenankan menggunakan sistem diskonto. Karakteristik *hawalah* atau hiwalah secara lengkap dan rinci dapat dilihat pada jasa layanan bank syariah tentang *hawalah*.

3) *Consumer Financing* – Murabahah

Beberapa contoh perusahaan *consumer financing* adalah Adira, FIF, Colombia, sumber kredit dimana dalam melakukan transaksi dari perusahaan ini konsumennya menerima barang yang pembayarannya dapat dilakukan dengan

tunai atau dengan tangguh/cicilan. Bank konvensional tidak diperkenankan menjalankan transaksi ini, tetapi dalam bank syariah diperkenankan dengan akad Murabahah.

Banyak yang mengatakan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah sama dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang dilakukan oleh bank konvensional. Murabahah dan kredit kendaraan bermotor dua hal yang berbeda, jika kredit kendaraan bermotor yang dilakukan oleh bank konvensional – bank menyediakan uang untuk nasabah untuk membeli kendaraan bermotor (yang disediakan bank adalah uang), sedangkan dalam murabahah yang dilakukan oleh bank syariah – bank menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah (yang disediakan bank adalah kendaraan bermotor).

4) Pegadaian – *Rahn*

Jelas bank konvensional tidak diperkenankan untuk menjalankan transaksi pegadaian karena ini merupakan kegiatan usaha perusahaan pegadaian, tetapi dalam bank syariah diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan usaha pegadaian dengan akad *Rahn*.

Masih banyak kegiatan usaha bank syariah yang tidak ada adalah bank konvensional namun dilaksanakan dalam kegiatan usaha lembaga keuangan non bank yang umumnya dikatakan bergerak dalam sektor riil. Jadi kesimpulannya, jika memperhatikan ketentuan syariah yang ada bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak membedakan bergerak pada sektor keuangan atau sektor riil. Kegiatan usaha bank syariah jauh lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, sehingga sangat disayangkan jika selalu disetarakan dengan bank

konvensional. Titik pandang “adanya perbedaan terdapat peluang” itulah seharusnya dipergunakan sebagai motivasi, kreativitas dan pendorong kemajuan bank syariah. Jika selalu membandingkan dan mensetarakan bank syariah dan bank konvensional maka memerlukan ratusan tahun untuk bisa mencapai kebesarannya seperti bank konvensional sekarang.²⁰

C. Fungsi Bank syariah

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

²⁰Soyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syairah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h 12-15

- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Seharusnya bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional, bank syariah yang tidak membedakan bergerak dibidang sektor keuangan atau sektor riil sebagaimana yang telah dibahas dimuka yaitu dapat melaksanakan kegiatan usaha *leasing* (ijarah), anjak piutang (*hawalah / Hiwalah*), *consumer financing* (*murabahah*), modal ventura (*musyarakah*), pegadaian (*rahn*) yang dibagian besar secara konsep berkaitan langsung dengan sektor riil maka bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa layanan dan sosial. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci mengenai fungsi-fungsi tersebut berikut dilakukan pembahasan satu persatu fungsi itu.

a. Fungsi Manager Investasi.

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah manager Investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun dengan prinsip *mudarabah* (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar-kecilnya imbalan (*bagi hasil*) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha

yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana (khususnya dana mudarabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana). Bank syariah dapat menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sembarangan sehingga banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan bermasalah (*non performing*), banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran, maka membawa dampak hasil usaha yang diikuti aliran kas masuk (*cash basis*) hanya kecil atau sedikit yang diterima. Dengan adanya hasil usaha yang *cash basis* kecil maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan *shahibul maal* juga kecil, yang akhirnya membawa dampak kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (*shahibul maal*). Begitu sebaliknya penyaluran dana yang tidak besar, namun dilakukan dengan efektif, efisien dan produktif, dan kualitas penyaluran dana yang baik sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil yang diterima dari nasabah pengelola dana (mudharib) banyak, akan membawa dampak pada hasil usaha yang akan dibagi antara bank syariah sebagai pengelola dana dan pemilik dana juga besar, yang mengakibatkan pendapatan bagi hasil diterima pemilik dana besar juga.

Dana yang dihimpun oleh bank syariah, hendaknya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak melanggar syariah, karena sesuai konsep syariah apa yang dilakukan oleh bank syariah dalam penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana yang dihimpun

(deposan atau penabung). Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, begitu deposan memberikan dana kepada bank konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, deposan tidak menanggung risiko. Bank bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau kecil bahkan tidak memperoleh pendapatan sama sekali, deposan sebagai pemodal akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan, dengan kata lain pemodal dalam aliran kapitalis tidak bersedia untuk menanggung risiko.

Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah bukanlah suatu indikasi imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (deposan atau penabung) besar, tetapi kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh terhadap imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. Besarnya porsi pembagian hasil usaha (nisbah) tidak menjamin besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh hasil usaha yang akan dibagikan (pendapatan operasi utama), hasil usaha yang akan dibagikan sangat dipengaruhi oleh pendapatan penyaluran dana yang diterima secara tunai (*cash basis*) oleh bank syariah sebagai pengelola dana (mudarib), pendapatan penyaluran dana dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif (penyaluran dana), kualitas aktiva produktif dipengaruhi oleh proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana. Secara umum dikatakan bahwa indikasi keberhatian bank syariah sebagai manajer investasi adalah adanya trend kenaikan return bagi hasil dari waktu ke waktu dan adanya trend penurunan pembiayaan bermasalah (*non Performing Financing*) dari waktu ke waktu. Kedua hal ini pemodal berhak

untuk memperoleh informasinya sebagai salah satu bentuk transparansi bank syariah.

b. Fungsi Investor.

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip *Ujroh* (*Ijarah*) dan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Keahlian, profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini, penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung *mudharabah*). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *murabahah*, akad *ijarah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *salam* atau *istisna*, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk. Hasil usaha yang diperoleh dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana (*shahibul maal*), dan bank syariah menerima

bagian keuntungan sebagai Mudarib sesuai yang disepakati antara pemilik dana dan bank sebagai pengelola, sebelum pelaksanaan akad.

Fungsi investor ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri. Karena bank syariah melaksanakan fungsi sebagai investor maka bank syariah penyedia dana bersedia untuk menanggung risiko dari investasinya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada saat bank syariah melakukan pengelolaan dana dengan prinsip bagi hasil, pendapatan dari hasil usaha sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh nasabah sebagai pengelola dana.

c. Fungsi Jasa perbankan.

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan *kliring*, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip *wakalah*; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah*; memberikan layanan *letter of credit* (L/C) dengan prinsip *wakalah*, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip *kafalah*; melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip *wakalah*, memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip *sharf* dan sebagainya. Bank-bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa

keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

Pada awal berkembang bank syariah, bank masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah hanya bank sosial, bank yang melayani kegiatan sosial saja, tidak ada kliring, tidak ada transfer tidak mengeluarkan cek atau *bilyet giro* dan sebagainya, namun dengan pemahaman dan penjelasan tentang bank syariah anggapan tersebut sudah tidak ada lagi.

d. Fungsi sosial.

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak

yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggung jawaban dalam pemegang amanah tersebut.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur kegiatan usaha Bank Umum Syariah :

- 1) Pasal 19 ayat 1 menjelaskan kegiatan Usaha Bank Umum Syariah sebagai berikut:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa *giro*, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

²¹Soyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h 15-21

- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudarah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;

- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
 - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
 - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat(1), dapat pula:
- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
 - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. Bertindak sebagai pendiri dan penguins dana pension berdasarkan prinsip syariah;
 - e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;

- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 24 ayat 1 dinyatakan Bank Umum Syariah dilarang:
- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.²²
- 5) Pasal 23 menjelaskan perihal Kelayakan Penyaluran Dana sebagai berikut:
- a. Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi

²²Soyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h 23-28

seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.

- b. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.²³

Kegiatan usaha bank syariah, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Beberapa pasal yang mengatur kegiatan usaha syariah tersebut adalah:

1. Pasal 36

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain
 - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadia'ah*
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan atau mudarabah; atau
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudarabah
- b. Melakukan penyaluran dana meliputi:
 - 1) Prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain :
 - a) Murabahah
 - b) *Istishna*

²³Soyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h 23

- c) *Salam*
- 2) Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain :
 - a) Mudarabah
 - b) Musyarakah
- 3) Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
 - a) Ijarah
 - b) *Ijarah muntahiya bittamlik*
- 4) Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*
- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
 - 1) *Wakalah*
 - 2) *Hawalah*
 - 3) Kafalah
 - 4) *Rahn*
- d. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah
- e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;

- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip;
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
- k. Memberikan fasilitas *letter of credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit , *charge card* berdasarkan prinsip syariah
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa dewan syariah nasional.

2. Pasal 37

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36,

Bank dapat pula :

- a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

3. Pasal 38

- 1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
- 2) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional

4. Pasal 39

- 1) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
- 2) Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional²⁴

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 tahun 2008 terdapat pada Bab I pasal 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

²⁴Soyan S. Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Cet.IV, Jakarta: LPFE Usakti 2010). h 33-35

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Berdasarkan definisi di atas maka pada dasarnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha produktif yang dikelola oleh perseorangan maupun institusi yang memenuhi kriteria dan persyaratan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM Merupakan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah.²⁵ Pada tanggal 4 Juli telah ditetapkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Mikro

²⁵Lincoln Arsyad. *Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008),h.8

adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

a. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Adapun definisi dan kriteria UMKM menurut berbagai sumber sebagai berikut :

Tabel 2.1

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Organisasi	Jenis Usaha	Kriteria
Kementrian Koperasi dan UKM (Undang-Undang RI No. 20 tahun 2008)	Usaha Mikro	1. Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50 juta. 2. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
	Usaha Kecil	1. Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50 juta sampai paling banyak Rp 500 juta. 2. Hasil penjualan tahunan (Omset/Tahun) lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 Milyar.
	Usaha Menengah	Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar.

Biro Pusat Statistik (BPS)	Usaha Mikro	Memiliki pekerja 1-4 orang
	Usaha Kecil	Memiliki pekerja 5-19 orang
	Usaha Menengah	Memiliki pekerja 20-99 orang
Bank Indonesia (BI)	Usaha Mikro (SK. Dir.BI No.31/24/Kep/DER Tanggal 5 mei 1998	1. Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin 2. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi sederhana 3. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry
	Usaha Menengah (SK Dir. BI No.30/45/Dir/UK tgl 5 Jan 1997)	1. Aset < Rp 5 Milyar 2. Aset < Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan. 3. Omset tahunan < 3 Milyar
Bank Dunia	Usaha Kecil	1. Jumlah karyawan < 30 orang 2. Pendapatan pertahun < \$ 3 juta 3. Jumlah aset < \$ 3 juta
	Usaha Menengah	1. Jumlah karyawan < 300 orang 2. Pendapatan pertahun < \$ 15 juta 3. Jumlah aset < \$ 15 juta

Sumber: Bank Indonesia. <http://infoukm.wordpress.com> (diolah)

b. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia

BPS (2013) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkontribusi sebesar 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Menteri Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah, Syariefuddin Hasan, mengatakan bahwa jumlah UKM di Indonesia mencapai sekitar 56,5 juta dan 99,8 persennya adalah UMKM. Jumlah tersebut meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi koperasi dan UMKM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia adalah 56 persen. Dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM, ekonomi kita akan semakin baik dan tumbuh. Hal ini menunjukkan tingginya kontribusi UMKM terhadap kondisi perekonomian tanah air.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia.

c. Tantangan dan Kendala Pengembangan UMKM

Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, tetapi kebijakan pemerintah dan peraturan yang mendukungnya belum dilaksanakan secara maksimal. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak yang terlibat dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai isu negatif misalnya politisasi terhadap KUKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah.

Selain permasalahan tersebut, secara umum permasalahan yang dihadapi UMKM saat ini yaitu masalah *Financial* dan *Non financial*. Adapun masalah *financial* yang dihadapi UMKM saat ini yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) Kurangnya kesesuaian (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM.
- 2) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM
- 3) Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil.
- 4) Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketiadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- 5) Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
- 6) Banyaknya UMKM yang belum *bankable*, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial.

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non finansial) diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan *qualitycontrol* yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.

²⁶Idris Yanto. “ Sektor UMKM di Indonesia “, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Volume 2, Nomor 1 (Gorontalo: Januari 2009) h. 5

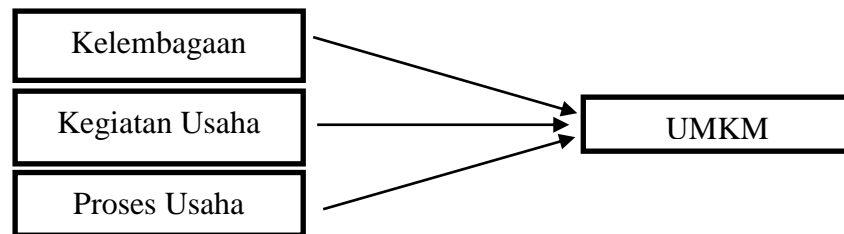
- 2) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar.
- 3) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM .
- 4) Model Pengembangan dan Strategi Pemberdayaan UMKM yang tepat.²⁷
 - a) Aspek manajerial yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omset/ tingkat utilitas/ tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b) Aspek permodalan yang meliputi: bantuan moral (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPeDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit mini/ Midi, KKU)
 - c) Mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar, baik melalui sistem Bapak–Anak Angkat. PIR, keterkaitan hulu-hilir (*Forward linkage*), kerekaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura ataupun subkontrak.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah

²⁷Idris Yanto. “ Sektor UMKM di Indonesia “, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*. Volume 2, Nomor 1 (Gorontalo: Januari 2009), hal 9

yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan di teliti.²⁸



Dari alur kerangka pikir yang digambarkan diatas bahwa variabel kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha sebagai variabel bebas (independen) nantinya akan memberikan pengaruh atau yang menjadi sebab dari variabel terikatnya (dependen) yaitu UMKM. kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses usaha sebagai alternatif perbankan syariah dalam mempengaruhi UMKM.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012., h. 91.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, penelitian menggunakan instrumen, analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Januari- Februari 2018.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁰ Dalam penelitian ini, populasi yang akan digunakan adalah para pemilik usaha mikro, kecil dan menengah Kota Palopo yang mengambil pembiayaan di bank syariah.

²⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, (Alfabeta: Bandung, 2013) h. 35-36

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.20: Bandung: Alfabeta,2014),h.80.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.³¹ Sampel berguna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena penggunaan sampel dapat meminimalisir penggunaan biaya dan mempersingkat waktu penelitian.

Penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan metode atau teknik *aksidental sampling (Insidental)*. *Non probality sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.³² *Aksidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan (*Insidental*) bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.³³ Teknik ini digunakan apabila jumlah populasi tidak diketahui sehingga tidak bisa menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Roscoe dalam buku *Research Methods For Business* mengemukakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.³⁴ Sampel daerah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kota Palopo dan sampel dari populasi UMKM yaitu nasabah yang memiliki pembiayaan di bank syariah Kota Palopo.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.20: Bandung: Alfabeta, 2014), h.81.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.20: Bandung: Alfabeta, 2014), h.84.

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 84-85

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Cet 5: Bandung: Alfabeta, 2016), h.164

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara *authentic* yang bersumber dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.³⁵ Untuk penelitian ini, data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Kota Palopo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah kuesioner. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dimana responden mengisi pertanyaan/penyataan yang telah disiapkan kemudian mengembalikannya ke peneliti.³⁶ Pernyataan-pernyataan dalam kuisisioner diukur dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5 (5 berarti sangat setuju dan 1 berarti sangat tidak setuju).³⁷

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Berdasarkan pengolahan data menggunakan program *SPSS for Windows* versi 16. Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dari model penelitian yang akan digunakan, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian

³⁵Rusady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Cet.3; edisi 1; Jakarta: PT Raja Grafindo,2006),h.29

³⁶Rusady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Cet.3; edisi 1; Jakarta: PT Raja Grafindo,2006),h.230

³⁷ Uma Sekaran. *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*.(Buku 2 Edisi 4; Jakarta: Salemba Empat, 2015), h 31-32

terhadap data penelitian tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah model tersebut dapat dianggap relevan atau tidak. Pengujian yang dilakukan melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji *Autokorelasi*, *Multikolonieritas*, *heterokedasitas*, juga uji statistik yaitu uji signifikan individu (uji statistik t), uji signifikan simultan (*uji statistik f*) dan uji koefisien determinasi (R^2) semua data diolah dan dianalisis dengan menggunakan regresi.

1. Metode Analisis Data

Penyelesaian penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang diwujudkan dengan kuantitatif. Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif karena jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Adapun pengolahan data dengan analisis kuantitatif melalui beberapa tahap yaitu :

1. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlations*). Jika r hitung $> r$ table, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Salah satu uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk yaitu validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut Jack R. Fraenkel, validasi konstruk (penentuan validitas konstruk) merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur, termasuk validasi isi dan kriteria. Suatu instrument penelitian dikatakan valid bila koefisien korelasi *product moment* melebihi 0.3.³⁸

Adapun hasil uji validitas kuesioner peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Hasil Uji Validitas

No	Butir Soal	Hasil Uji	Keterangan
1	Soal 1	,669	<i>Valid</i>
2	Soal 2	,388	<i>Valid</i>
3	Soal 3	,420	<i>Valid</i>
4	Soal 4	,516	<i>Valid</i>
5	Soal 5	,521	<i>Valid</i>
6	Soal 6	,715	<i>Valid</i>
7	Soal 7	,734	<i>Valid</i>
8	Soal 8	,621	<i>Valid</i>
9	Soal 9	,649	<i>Valid</i>

³⁸ Syofian Siregar. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif* (Cet.2: edisi 1; Jakarta; Bumi Aksara, 2014), h.77

10	Soal 10	,371	<i>Valid</i>
11	Soal 11	,499	<i>Valid</i>
12	Soal 12	,587	<i>Valid</i>
13	Soal 13	,393	<i>Valid</i>
14	Soal 14	,561	<i>Valid</i>
15	Soal 15	,512	<i>Valid</i>
16	Soal 16	,323	<i>Valid</i>

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai $\alpha > 0,6$.³⁹

Adapun hasil uji reliabilitas kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.716	17

Sumber : Diolah menggunakan SPSS

³⁹Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014),h.87

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis regresi linier harus memperhatikan asumsi-asumsi yang mendasari model regresi. Terdapat asumsi penting mendasari model regresi linier klasik yaitu variabel-variabel tersebut tidak terjadi *Autokorelasi*, *multikolonieritas*, dan *heterokedastisitas* diantara variabel bebas dalam regresi tersebut. Maka tahap selanjutnya dilakukan uji statistik yaitu *uji t* dan *uji f*.⁴⁰

a. Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Beberapa penyebab *autokorelasi* salah satunya adalah data bersifat *time series*, yaitu data berupa runtun waktu dimana nilai pada masa sekarang dipengaruhi oleh nilai masa lalu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari *autokorelasi*. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi gejala *autokorelasi* yaitu *uji durbin Watson (DW test)*, *uji Langrage Multiplier (LM test)*, *uji statistik dan Runs Test*.⁴¹ Dalam penelitian ini menggunakan uji *Runs Test*.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolineritas berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolineritas

⁴⁰Zulfikar. *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 222.

⁴¹Irwan Gani dan Siti Amalia. *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015), h.124.

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak.⁴² Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.⁴³

c. *Uji Heterokedastisitas*

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah kategori mempunyai varians yang sama diantara anggota tersebut. Jika varians sama, dan ini seharusnya terjadi, maka dikatakan *Homokedastisitas*. Sedangkan jika varians tidak sama, dikatakan terjadi *Heterokedastisitas*. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi gejala *heterokedastisitas* salah satunya yaitu jika tingkat signifikansi pada uji *coefficients* lebih besar dari 0,05.⁴⁴ Dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*multiple regression*). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk

⁴²Suliyanto. *EKONOMETRIKA TERAPAN: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*.(Yogyakarta: ANDI), hlm. 81

⁴³Imam Ghazali. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*.(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 105

⁴⁴Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, h. 182.

mengetahui beberapa besar pengaruh variabel bebas dan terikat. Secara umum persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut.⁴⁵

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = UMKM

X₁ = Kelembagaan

X₂ = Kegiatan Usaha

X₃ = Proses Usaha

a = konstanta atau bila harga X=0

b₁ – b₃ = Koefesien regresi

e = error⁴⁶

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Individual (Uji *t*-Statistik)

Uji *t* digunakan untuk menguji hubungan regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur tingkat signifikan setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya dalam model regresi.

- 1) Jika $T_{Hitung} < T_{Tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

⁴⁵Syofian Siregar. *Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014),h.406

⁴⁶Wahid Sulaiman. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS contoh Kasus dan Pemecahannya*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2014) h 80.

2) Jika $T_{\text{Hitung}} > T_{\text{Tabel}}$, maka H_a diterima dan H_o ditolak, artinya ada pengaruh antara variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Pengujian ini dilakukan pada taraf signifikansi tertentu adalah 5% yang artinya tingkat kesalahan suatu variabel adalah 5% atau 0,05 sedangkan tingkat keyakinannya adalah 95% atau 0,95. Jadi apabila tingkat kesalahan suatu variabel $> 5\%$ atau 0,05 berarti variabel tersebut tidak signifikan dan begitu sebaliknya. Apabila tingkat kesalahan suatu variabel $< 5\%$ atau 0,05 berarti variabel tersebut signifikan.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji *f*-statistik)

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh variabel *independen* secara bersama-sama terhadap variabel *dependen*. Maka dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut :

1) Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka H_o diterima yang berarti secara bersama-sama variabel *independen* secara signifikan tidak dipengaruhi variabel *dependen*.

2) Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka H_a ditolak yang berarti secara bersama-sama variabel *independen* secara signifikan mempengaruhi variabel *dependen*.

Selain dengan cara diatas, uji-*F* juga dapat dilakukan dengan cara *Quick Look*, yaitu : melihat nilai probability dan derajat kepercayaan yang ditentukan dalam penelitiannya atau melihat nilai *F*-tabel dengan *F*-hitungnya. Jika nilai *probability* $< 0,05$ yang berarti menolak H_o dan menerima H_1 dan sebaliknya.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel *independen* secara bersama-sama mempengaruhi variabel *dependennya* dan sebaliknya.⁴⁷

c. Koefisien *Determinasi* R^2 (*Goodness Of Fit*)

Koefisien *Determinasi* adalah kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, semakin angka mendekati satu maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya, sebaliknya semakin angka mendekati nol maka kita mempunyai garis regresi yang kurang baik. Koefisien determinasi, merupakan konsep statistik, sehingga sebuah garis regresi baik jika nilai R tinggi.⁴⁸

⁴⁷Sofyan Yamin dan Heri Kurniawan. *spss complete*, (Cet. III; Jakarta: Salemba Infotek, 2011), h. 92-93.

⁴⁸Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika*, h. 168.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Variabel

Untuk melihat tanggapan responden terhadap indikator-indikator dan juga perhitungan skor bagi variabel perbankan dan UMKM, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Variabel Perbankan Syariah Aspek Kelembagaan

Tabel 4.1
Frekuensi Jawaban Responden Pelaku UMKM Berdasarkan Aspek Kelembagaan

No Item	SS		S		N		TS		STS		total (%)	total responden
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	9	30%	19	63%	2	7%	0	0%	0	0%	100%	30
2	10	33%	14	47%	5	17%	1	3%	0	0%	100%	30
3	5	17%	17	57%	7	23%	1	3%	0	0%	100%	30
4	5	17%	16	53%	9	30%	0	0%	0	0%	100%	30

- a. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan “Konsep islam/syariah yang diterapkan bank syariah menjadi faktor keputusan menggunakan produk bank syariah” aspek kelembagaan dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 9 responden (30%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 19 responden (63%) yang menyatakan setuju, 2 responden (7%) yang

menyatakan netral, 0% menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

- b. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan akses bank syariah ke UMKM aspek kelembagaan dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 10 responden (33%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 14 responden (47%) yang menyatakan setuju, 5 responden (17%) yang menyatakan netral, 1 responden (3%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.
- c. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan kehadiran bank syariah memberikan peluang usaha aspek kelembagaan dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 5 responden (17%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 16 responden (53%) yang menyatakan setuju, 9 responden (30%) yang menyatakan netral, 0 responden (0%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.
- d. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan prinsip kemaslahatan bank syariah aspek kelembagaan dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 10 responden (33%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 14 responden (47%) yang menyatakan setuju, 5 responden (17%) yang menyatakan netral, 1 responden (3%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

2. Variabel Perbankan Syariah Aspek Kegiatan Usaha

Tabel 4.2
Frekuensi Jawaban Responden Pelaku UMKM Berdasarkan Aspek Kegiatan Usaha

No Item	SS		S		N		TS		STS		total (%)	total responden
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	7	23%	14	47%	7	23%	2	7%	0	0%	100%	30
2	1	3%	7	23%	16	53%	6	20%	0	0%	100%	30
3	4	13%	15	50%	11	37%	0	0%	0	0%	100%	30
4	6	20%	18	60%	6	20%	0	0%	0	0%	100%	30

- a. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan penggunaan pembiayaan bank syariah aspek kegiatan usaha dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 7 responden (23%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 14 responden (47%) yang menyatakan setuju, 7 responden (23%) yang menyatakan netral, 2 responden (7%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.
- b. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan penggunaan pinjaman bank syariah untuk gaji karyawan aspek kegiatan usaha dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 1 responden (3%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 7 responden (23%) yang menyatakan setuju, 16 responden (53%) yang menyatakan netral, 6 responden (20%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

- c. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan peningkatan pendapatan usaha aspek kegiatan usaha dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 4 responden (13%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 15 responden (50%) yang menyatakan setuju, 11 responden (37%) yang menyatakan netral, 0 responden (0%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.
- d. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan bagi hasil bank syariah aspek kegiatan usaha dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 6 responden (20%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 18 responden (60%) yang menyatakan setuju, 6 responden (20%) yang menyatakan netral, 0 responden (0%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

3. Variabel Perbankan Syariah Aspek Proses Usaha

Tabel 4.3
Frekuensi Jawaban Responden Pelaku UMKM Berdasarkan Aspek Proses Usaha

No Item	SS		S		N		TS		STS		total (%)	total responden
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	7	23%	19	63%	2	7%	2	7%	0	0%	100%	30
2	3	10%	15	50%	9	30%	3	10%	0	0%	100%	30
3	2	7%	18	60%	10	33%	0	0%	0	0%	100%	30
4	9	30%	16	53%	2	7%	3	10%	0	0%	100%	30

- a. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan akses bank syariah aspek proses usaha dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 7 responden (23%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 19

responden (63%) yang menyatakan setuju, 2 responden (7%) yang menyatakan netral, 2 responden (7%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

- b. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan bagi hasil bank syariah untuk gaji karyawan aspek proses usaha dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 3 responden (10%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 15 responden (50%) yang menyatakan setuju, 9 responden (30%) yang menyatakan netral, 3 responden (10%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.
- c. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan persyaratan usaha pada aspek proses usaha dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 2 responden (7%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 18 responden (60%) yang menyatakan setuju, 10 responden (33%) yang menyatakan netral, 0 responden (0%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.
- d. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan kemudahan transaksi bank syariah untuk aspek proses usaha dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 9 responden (30%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 16 responden (53%) yang menyatakan setuju, 2 responden (7%) yang menyatakan netral, 3 responden (10%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

4. Variabel UMKM

Tabel 4.4
Frekuensi Jawaban Responden Pelaku UMKM Berdasarkan variabel
UMKM

No Item	SS		S		N		TS		STS		total (%)	total respo nden
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	4	13%	14	47%	12	40%	0	0%	0	0%	100%	30
2	2	7%	14	47%	12	40%	2	7%	0	0%	100%	30
3	4	13%	18	60%	7	23%	1	3%	0	0%	100%	30
4	3	10%	15	50%	9	30%	3	10%	0	0%	100%	30

- a. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan tagihan bank syariah untuk variabel UMKM dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 4 responden (13%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 14 responden (47%) yang menyatakan setuju, 12 responden (40%) yang menyatakan netral, 0 responden (0%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.
- b. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan jumlah pendapatan untuk variabel UMKM dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 2 responden (7%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 14 responden (47%) yang menyatakan setuju, 12 responden (40%) yang menyatakan netral, 2 responden (7%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

- c. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan syarat pembiayaan bank syariah untuk variabel UMKM dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 3 responden (14%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 18 responden (60%) yang menyatakan setuju, 7 responden (23%) yang menyatakan netral, 1 responden (3%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.
- d. Frekuensi jawaban responden tentang item pertanyaan lokasi usaha untuk variabel UMKM dari kuesioner yang diisi dan dianalisis, diketahui bahwa 3 responden (10%) pelaku UMKM yang menyatakan sangat setuju, 15 responden (50%) yang menyatakan setuju, 9 responden (30%) yang menyatakan netral, 3 responden (10%) menyatakan tidak setuju dan 0% yang menyatakan sangat tidak setuju.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Tabel 4.5

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.42016
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	15
Total Cases	30
Number of Runs	20
Z	1.301
Asymp. Sig. (2-tailed)	.193

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.42016
Cases < Test Value	15
Cases >= Test Value	15
Total Cases	30
Number of Runs	20
Z	1.301
Asymp. Sig. (2-tailed)	.193

a. Median

Berdasarkan tampilan output “Runs Test” diketahui besarnya nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) yaitu 0.193 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 ($0.193 > 0.05$) hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau dapat berarti uji korelasi lolos.

b. Uji Multikolonieritas

Tabel 4.6**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.756	3.297		1.746	.093		
Kelembagaan	-.041	.230	-.036	-.180	.859	.655	1.526
Kegiatan Usaha	.271	.175	.279	1.544	.135	.818	1.223
Proses Usaha	.365	.179	.408	2.039	.052	.666	1.501

a. Dependent Variable: UMKM

Dari hasil uji multikolonieritas tersebut diperoleh nilai *tolerance* (a) variabel bebas dari ketiga aspek yaitu $0.655 = 65.5\%$, $0.818 = 81.8\%$, $0.666 = 66.6\% > 10\%$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) hitung dari ketiga aspek yaitu 1.526, 1.223 dan $1.501 < 10$. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini antara variabel bebas tidak terjadi multikolonieritas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7

Correlations					
		Kelembagaan	Kegiatan Usaha	Proses Usaha	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Kelembagaan	Correlation Coefficient	1.000	.359	.517**
		Sig. (2-tailed)	.	.051	.003
		N	30	30	30
	Kegiatan Usaha	Correlation Coefficient	.359	1.000	.457*
		Sig. (2-tailed)	.051	.	.011
		N	30	30	30
	Proses Usaha	Correlation Coefficient	.517**	.457*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.003	.011	.
		N	30	30	30
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.088	-.136	-.038
		Sig. (2-tailed)	.645	.473	.841
		N	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed).

Berdasarkan output di atas diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) ketiga variabel independen yaitu kelembagaan (0.645), variabel kegiatan usaha (0.473) dan variabel proses usaha (0.841). Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih besar dari 0.05 atau $(0.645 > 0.05)$, $(0.473 > 0.05)$ dan $(0.841 > 0.05)$. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas atau uji korelasi lolos.

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi R^2

Tabel 4.8

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553 ^a	.305	.225	1.553

a. Predictors: (Constant), Proses Usaha, Kegiatan Usaha, Kelembagaan

Berdasarkan tampilan output *summary* diperoleh *R square* sebesar 0.305. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaruh perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo sebesar 0.305 atau sama dengan 30.5% dan persentase pengaruhnya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar $(100\% - 30.5\% = 69.5\%)$

b. Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 4.9**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.756	3.297		1.746	.093
Kelembagaan	-.041	.230	-.036	-.180	.859
Kegiatan Usaha	.271	.175	.279	1.544	.135
Proses Usaha	.365	.179	.408	2.039	.052

a. Dependent Variable: UMKM

Berdasarkan tampilan *output* hasil uji t pada tabel diatas didapatkan hasil dari variabel kelembagaan dengan nilai $T_{Hitung} > T_{Tabel}$ atau $-0.180 < 1.706$ dengan taraf signifikan sebesar 0.859 atau $0.859 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kelembagaan tidak memiliki pengaruh terhadap UMKM dan tidak signifikan, variabel kegiatan usaha dengan nilai $T_{Hitung} > T_{Tabel}$ atau $1.554 < 1.706$ dengan taraf signifikan sebesar 0.135 atau $0.135 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kegiatan usaha tidak memiliki pengaruh terhadap UMKM dan tidak signifikan. Variabel proses usaha $T_{Hitung} > T_{Tabel}$ atau $2.039 > 1.706$ dengan taraf signifikan sebesar 0.052 atau $0.052 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel proses usaha memiliki pengaruh terhadap UMKM dan tetapi tidak signifikan

c. Uji Signifikansi Simultan (Uji f)

Tabel 4.10**ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	27.571	3	9.190	3.809	.022 ^a
	Residual	62.729	26	2.413		
	Total	90.300	29			

a. Predictors: (Constant), Proses Usaha, Kegiatan Usaha, Kelembagaan

b. Dependent Variable: UMKM

Hasil uji simultan (uji-f) pada tabel 4.10 tersebut jika dilihat dari nilai $F_{Hitung} > F_{Tabel}$ dan nilai signifikan < 0.05 (H_0 ditolak dan H_1 diterima) maka variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen. Sehingga memperlihatkan bahwa nilai F_{Hitung} sebesar 3.809 dan F_{Tabel} sebesar 2.98 atau $3.809 > 2.98$ dengan nilai probabilitas signifikannya sebesar 0.022 atau $0.022 < 0.05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa model ini signifikan sehingga dapat dikatakan ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh terhadap UMKM melalui perbankan syariah dari segi kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa perbankan syariah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo dilihat dari variabel kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha dengan tingkat pengaruh sebesar 30,5% sedangkan 69,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Karena nilai *R Square* (R^2) adalah 0,305 cenderung

mendekati nilai 0 maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas.

Hasil uji signifikasnsi simultan (Uji F) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo. Hal ini berdasarkan skor $F_{hitung} > F_{tabel}$ yakni $3.809 > 2.98$ dengan skor signifikansi sebesar $0.022 < 0.05$.

Adanya pengaruh perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Jannah yang mengatakan perbankan syariah memiliki kontribusi dalam perkembangan UMKM. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Program pembinaan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan kota Magelang juga melibatkan pihak perbankan maupun lembaga keuangan lain yang ada di kota Magelang, termasuk perbankan syariah. Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Magelang telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi peningkatan dan perkembangan pelaku usaha kecil dan menengah di kota dan kabupaten Magelang, walaupun secara kuantitas masih harus ditingkatkan.⁴⁹ UMKM merupakan potensi ekonomi yang luar biasa, karena dari UMKM akan berkembang unit-unit perekonomian yang akan menopang sektor kehidupan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁴⁹Eko Kurniasih Pratiwi dan Nasitotul Jannah. *Peran Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM di Kota Magelang*. Magelang: 2014.

Meningkatnya animo masyarakat terhadap bank syariah khususnya dalam penyaluran dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menunjukan betapa pentingnya kehadiran bank syariah. Selain itu *trend* yang mulai berfikir untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan syariah Islam, begitu juga dalam hal perekonomian. Sehingga ketika bank syariah mulai berkembang dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah berbagai produk atau fasilitasnya, maka dengan kesadaran sendiri mulai memindahkan transaksi dana khususnya meminjam ke bank syariah. Bank syariah sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan uang (pemodal/penabung) dan pihak yang kekurangan modal. Praktek pembiayaan syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudarabah, musyarakah, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun dalam praktiknya akad yang banyak dipakai adalah mudarabah dan musyarakah.⁵⁰ Dengan adanya produk-produk yang ditawarkan bank syariaah yang berkaitan dengan pembiayaan untuk masyarakat sehingga diharapkan dapat memaksimalkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di masyarakat.

Namun, Indonesia terkadang masih memandang sebelah mata keberadaan UMKM. Padahal keberadaan UMKM dirasa sangat penting dalam membangkitkan kembali ekonomi nasional yang terpuruk akibat krisis. UMKM telah menunjukkan memiliki fondasi yang kuat sehingga mampu mandiri, tetapi dalam kenyataannya, hingga kini UMKM tetap seperti dianaktirikan. Pemerintah

⁵⁰Zamroni. *Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Iqtishadia, Vol.6, No.2, September 2013.h. 239

belum bisa memberikan solusi yang tuntas bagi pengembangannya, terutama dalam meningkatkan kualitas produknya maupun dalam mengatasi kesulitan permodalan.⁵¹ Padahal kehadiran UMKM mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Dalam sektor ekonomi di Indonesia secara factual sebagian besar didukung oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan, terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Pemberian fasilitas kredit sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kreditnya, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁵²

⁵¹Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2016), h. 79

⁵²Muslimin Kara. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Umk) di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol.47, No. 1, Juni 2013. h. 272

Oleh karena itu dengan melihat adanya pengaruh yang diberikan perbankan syariah dalam perkembangan UMKM di Kota Palopo maka kehadiran perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat mengatasi kesulitan permodalan yang dialami oleh UMKM, karena UMKM memiliki peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Kota Palopo. UMKM menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat Kota Palopo. Perkembangan UMKM di Kota Palopo berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat Kota Palopo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu didapatkan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.305 atau sama dengan 30.5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh yang diberikan perbankan syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Palopo sebesar 30.5% dengan 69.5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji simultan memperlihatkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3.809 dan F_{tabel} sebesar 2.98 atau $3.809 > 2.98$ dengan nilai probabilitas signifikannya sebesar 0.022 atau $0.022 < 0.05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Maka disimpulkan variabel perbankan syariah dari aspek kelembagaan, kegiatan usaha dan proses usaha secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel UMKM.

B. Saran

UMKM seharusnya menjadi perhatian pemerintah dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai minat dan kemampuan agar masyarakat tidak mencari pekerjaan bahkan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan terjemahan. Departemen Agama RI, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010),
- Azansyah, 2013. "*Peran Kelembagaan dalam Perekonomian, Kondisi Pembangunan Kelembagaan Di Indonesia, dan Membangun Lembaga yang Efektif*", jurnal : "Ekonomi dan Bisnis Islam", Vol. VII, No.2
- Arsyad, Lincolin. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: Andi Offset)
- Departemen Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia Tahun 2014
- Fajar, Mukti. 2011. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- _____. 2016. *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka pelajar).
- Gani, Irwan dan Siti Amalia. 2015. *Alat Analisis Data Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi & Sosial* (Yogyakarta: CV. Andi Offset)
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM spss 19*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro)
- Kara, Muslimin. 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol.47, No. 1, Juni
- Laporan Tahunan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016.
- Muheramtohad, Singgih. 2017. *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Muqtasid.
- Muryasari, Yunita. 2017. "*Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Indonesia*". Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
- Pratiwi, Eko Kurniasih dan Nasitotul Jannah. 2015. *Peran Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UMKM Di Kota Magelang*.
- Rini, Hana Zunia. 2017. *Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri Rumah Tangga Batik Laweyan*. Journal of Multidisciplinary Studies. Vol 1, No.1.
- Ruslan, Rusady. 2006. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Cet.3; edisi 1; Jakarta: PT Raja Grafindo)
- Sekaran, Uma. 2015. *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)*. (Buku 2 Edisi 4; Jakarta: Salemba Empat)
- Setyani Irmawati dkk. "*Model Inklusif Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan*" *Journal of Economic and Policy*, (Semarang September 2013)

- Singgih, Mohamad Nur.2007. *Strategi Penguatan UMKM Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia* , *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Vol 3, No. 3
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif* (Jakarta :PT Bumi Aksara)
- Sofyan S. Harahap, dkk.2010. *Akuntansi Perbankan Syairah* (Cet.IV; Jakarta: LPFE Usakti).
- Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*, (Alfabeta : Bandung)
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,(Cet.20 ; Bandung: Alfabeta)
- _____. 2016. *Metode Penelitian Manajemen* (Cet 5; Bandung: Alfabeta,),
- Sulaiman, Wahid. 2014. *Analisis Regresi Menggunakan SPSS contoh Kasus dan Pemecahannya*, (Yogyakarta, Andi Offset)
- Suliyanto. *EKONOMETRIKA TERAPAN: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. (Yogyakarta: ANDI)
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2. Tentang Perbankan
- Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan. 2011. *SPSS Complete*, (Cet. III; Jakarta: Salemba Infotek)
- Yanto, Idris. 2009. *Sektor UMKM di Indonesia “* , *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS. Volume 2, Nomor 1* (Gorontalo: Januari)
- Zulfikar. 2016. *Pengantar pasar modal dengan pendekatan statistika*, (Yogyakarta: Deepublish).

RIWAYAT HIDUP



Daliati, lahir di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Kab. Luwu Utara, 09 Oktober 1995, merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dan merupakan buah kasih sayang dari Daslang dan Kasniati. Adapun pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu dimulai dari pendidikan sekolah tingkat dasar, tepatnya di SDN 144 Salobongko dan dinyatakan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMP, tepatnya di Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Salobongko dan dinyatakan tamat pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di tingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 1 Malangke Barat dan dinyatakan tamat pada tahun 2014.

Akhir pada tahun 2014 penulis mendaftarkan diri pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang pada saat itu masih berstatus STAIN Palopo yang kemudian diterima pada program studi Perbankan Syariah yang tergabung dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menyandang status mahasiswa, penulis aktif mengikuti Organisasi yaitu:

1. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Graffity IAIN Palopo Tahun 2015
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah Tahun 2016

Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir Skripsi untuk menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan dengan judul skripsi ***“Pengaruh Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palopo”***. Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang diinginkan, Amin. Demikianlah riwayat hidup penulis.